

MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN TNI (Studi Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial Di Batalyon Infanteri 712 Wiratama – Manado)

Oleh :

MUHAMMAD RIDHA SALEWANGANG

Dalam suatu sistem demokrasi dimana negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan, maka posisi militer di dalam sebuah Negara sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan itu menjadi minimal. Fungsi itu bisa dikatakan sebagai kewajiban pokok dari sebuah institusi militer. Dengan demikian posisi militer atau angkatan bersenjata merupakan sebuah institusi yang sah atau lazim karena disepakati dalam sebuah organisasi yang bernama negara, yang mempunyai kewajiban berkaitan dengan perlindungan negara demi memproteksi masyarakat dari ancaman fisik.

Dalam konteks kelembagaan TNI sebagai “pemain” untuk pembangunan, sangat mengakui bahwa modal sosial menjadi penting. Konsep modal sosial (social capital) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan prajurit karena dalam model ini, prajurit ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar prajurit dapat berperan dalam model pembangunan. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan keterbatasan akses secara ekonomi karena hal itu tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring kerja (network) dan saling percaya (mutual trust) di kalangan prajurit TNI.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem demokrasi adalah keniscayaan bagi negara modern. Huntington, seorang realis yang fokus pada isu-isu peradaban, demokrasi dan hubungan sipil-militer, mendefinisikan demokrasi, sebagai suatu bentuk pemerintahan, berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan (Huntington, 2001:4). Karena itu, demokrasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk melihat tingkat pencapaian masyarakat yang ideal. Sementara Negara sebagai suatu organisasi sosial terbesar dalam masyarakat mempunyai fungsi sebagai kewajibannya; melindungi masyarakat dari ancaman atau gangguan serta menjamin hak-hak masyarakat. Oleh

karena itu negara sebagai organisasi yang besar diberikan wewenang oleh masyarakatnya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Tujuan negara adalah berupaya mengkonsolidasikan tujuan dan kepentingan bersama dikalangan masyarakat secara umum (Tim Kontras, 2005:18).

Sejak reformasi 1998, paradigma baru TNI dirumuskan dalam jargon, “tidak selalu harus di depan, tidak lagi menduduki tapi mempengaruhi, tidak lagi mempengaruhi secara langsung, tetapi tidak langsung, siap membagi peran dengan pihak sipil dalam pengambilan keputusan penting dengan komponen bangsa yang lain.” Jargon baru ini menggantikan jargon lama yang full-power yaitu “TNI sebagai stabilisator dan dinamisator” (Tim Kontras, 2005:26).

Dalam konteks kelembagaan TNI sebagai “pe-

main” untuk pembangunan, sangat mengakui bahwa modal sosial menjadi penting. Konsep modal sosial (social capital) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan prajurit karena dalam model ini, prajurit ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar prajurit dapat berperan dalam model pembangunan. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan keterbatasan akses secara ekonomi karena hal itu tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring kerja (network) dan saling percaya (mutual trust) di kalangan prajurit TNI.

Realitas sekarang ini yang tergambar dalam mentalitas prajurit, seperti umumnya mentalitas masyarakat Indonesia, bangunannya adalah cenderung gemar menempuh praktis, asing dengan perubahan dan cenderung tidak rela orang lain mencapai prestasi yang lebih baik. Saat ini, prajurit seakan kehilangan sebuah energi, yakni energi kolektif untuk mengatasi problem bersama dalam meningkatkan pembangunan dalam konteks yang lebih besar. Prajurit menghendaki adanya peningkatan ekonomi, tetapi tidak ada gerakan untuk upaya tersebut. Mereka menjerit tentang rumah dinas yang hampir rapuh, tetapi langkah bersama untuk mengatasinya juga tidak terlihat. Kondisi semacam ini mencerminkan bahwa prajurit sedang tertimpa penyakit yang sangat kronis, yaitu hilangnya kebersamaan dan energi kelompok karena hilangnya Social Capital (Modal Sosial) tersebut. Dengan dasar inilah, maka Modal sosial dan Pembangunan TNI menjadi penting untuk di kaji secara lebih mendalam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dapat disusun, yakni sebagai berikut:

- Bagaimanakah Kondisi Modal Sosial Pada TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama Teling?
- Bagaimanakah Keterkaitan Modal Sosial dengan Pembangunan Pada TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama Teling?
- Bagaimanakah Desain pemanfaatan Modal Sosial untuk pembangunan Pada TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama Teling?

1.3. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bentuk dan jenis modal sosial yang ada Pada TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama Teling serta menganalisis manfaat dari Modal Sosial yang merupakan faktor penunjang Pembangunan TNI.

Namun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Kondisi Modal Sosial Pada TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama Teling?
- Keterkaitan Modal Sosial dengan Pembangunan Pada TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama Teling?
- Desain pemanfaatan Modal Sosial untuk pembangunan Pada TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama Teling?

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini:

- Secara teoritis, hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pemerintahan, khususnya berkenaan dengan Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pembangunan sehingga mempermudah proses kebijakan pembangunan, selain itu juga dapat menjadi referensi atau bahan kajian ilmiah untuk di kaji ulang oleh peneliti berikutnya pada fokus, lokus dan tempus yang berbeda.
- Secara praktis, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi pengambil kebijakan Pada TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama Teling, sehingga secara terus-menerus dan berkesinambungan dapat memanfaatkan dan meningkatkan Modal sosial untuk Pembangunan yang sejalan dengan perkembangan dan tuntutan kemajuan zaman. Kemudian juga, hasil temuan ini menjadi pengalaman dan pengetahuan yang berharga bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan yang sejalan dengan disiplin ilmu yang sedang didalami peneliti.

LANDASAN TEORI

2.1. Modal Sosial

Secara etimologis social capital mempunyai pengertian modal yang dimiliki oleh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Modal ini merupakan perpaduan antara sesuatu yang bersifat material dan non material. Material mempunyai makna tentang kepemilikan berkaitan dengan aset-aset finansial yang dimiliki. Sedangkan non material modal berwujud adanya mutual trust (kepercayaan) dan gathering system (system kebersamaan) dalam suatu

masyarakat (Joseph M. Bessette dalam Edkins dan Wiliams, 2010:315).

Akar teori modal sosial dapat ditemukan dalam filsafat dan ekonomi pencerahan yang dibuat oleh Hume, Burke, dan Adam Smith pada abad 18 yang tidak hanya melihat dasar kelembagaan utama sebuah masyarakat, yaitu “kontrak sosial”, akan tetapi juga melihat beberapa karakteristik jaringan resiprokal. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Marx dan Engels melalui konsep solidaritas pengikat (*bounded solidarity*) untuk menjelaskan hubungan yang berkembang dan kerjasama yang muncul ketika kelompok mengalami tekanan atau menemui kesulitan. Simmel menjelaskan transaksi timbal balik (*reciprocity transaction*) yang akan memunculkan konsep balas budi yang akan dikembangkan lebih lanjut yang mengarah pada keterikatan yang erat antar warga komunitas. Durkheim dan Parson mengembangkan apa yang disebut dengan *value introjection*, di mana nilai, moral, dan komitmen mendahului hubungan kontraktual. Weber mengembangkan konsep *enforceable trust*, yaitu kepercayaan yang dapat dilaksanakan. Terdapat demikian banyak definisi kapital sosial dalam berbagai literatur, termasuk perbedaan penggunaan kata yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang sama, antara lain energi sosial (*social energy*), spirit komunitas (*community spirit*), keterikatan sosial (*social bonds*), kebajikan warga (*civic virtue*), jaringan komunitas (*community network*), ozon sosial (*social ozone*), persahabatan yang luas (*extended friendships*), kehidupan komunitas (*community live*), sumber daya sosial (*social resources*), jaringan sosial (*social network*), kehidupan ketetanggaan (*good neighbourhoodness*), perekat sosial (*social glue*).

Modal sosial dibentuk oleh unsur-unsur pokok yang terdiri dari (Jousairi Hasbullah. 2006:9): (1) partisipasi dalam suatu jaringan; (2) *reciprocity*; (3) *trust*; (4) norma sosial; (5) nilai; dan (6) tindakan yang proaktif. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Pada kelompok sosial yang terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman-pengalaman sosial turun temurun (*repeated social experiences*) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesivitas tinggi, tetapi rentang jaringan maupun *trust* yang terbangun

sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Modal sosial yang demikian akan lebih banyak mendatangkan dampak positif bagi kemajuan kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas.

2.2. Model-model pengukuran Modal Sosial

Terdapat beragam metode pengukuran modal sosial yang dapat disesuaikan dengan kondisi (Deepa Narayan dan Michael F. Cassidy dalam Laporan Penelitian LEMLIT Universitas Padjajaran, 2008:23) diantaranya:

2.2.1. World Values Survey

Model ini digunakan oleh Ronald Inglehart (1981-1995) untuk memahami peran faktor budaya dalam pembangunan politik dan ekonomi. Aspek yang paling terkait dengan modal sosial dalam model ini adalah *trust* (kepercayaan) dan keanggotaan dalam suatu asosiasi. Sekalipun hasil survei ini tidak membuktikan adanya korelasi langsung antara modal sosial dengan pembangunan politik dan ekonomi, namun hasil temuan Inglehart memperkuat asumsi Putnam bahwa organisasi sukarela memainkan peran positif untuk memperkuat tahap awal dari pembangunan ekonomi.

2.2.2. New South Wales Study

Ony dan Bullen (1997) mengembangkan alat ukur praktis untuk mengukur modal sosial pada skala organisasi komunitas, serta dampaknya pada pengembangan partisipasi publik. Model ini menggunakan 8 (delapan) faktor sebagai indikator bagi modal sosial, yakni: (a) partisipasi di tingkat komunitas lokal; (b) aktivitas dalam konteks sosial; (c) perasaan kepercayaan dan keamanan; (d) koneksi dalam lingkungan ketetanggaan; (e) koneksi dengan keluarga dan teman-teman; (f) toleransi terhadap perbedaan; (g) nilai-nilai kehidupan; serta (h) koneksi dalam lingkungan pekerjaan.

2.2.3. The Barometer of Social Capital Colombia

John Sudarsky (1999) mengembangkan model pengukuran modal sosial dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi, yakni: (a) kepercayaan terhadap institusi; (b) partisipasi kewargaan; (c) saling ketergantungan dan imbal balik; (d) relasi horisontal; (e) hirarkhi; (f) kontrol sosial; (g) kepemerintahan sipil; dan (h) partisipasi politik.

2.2.4. Index of National Civic Health

Indeks ini dikembangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk merespon penurunan partisipasi masyarakat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) indikator, yakni: (a) keterlibatan politik; (b) kepercayaan; (c) keanggotaan dalam asosiasi; (d) keamanan dan kejahatan; serta (e) integritas dan stabilitas keluarga. Keterlibatan politik mencakup pemberian suara dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya, seperti petisi dan menulis surat kepada koran. Kepercayaan diukur melalui tingkat kepercayaan pada orang lain dan kepada institusi pemerintah. Keanggotaan dalam asosiasi diukur melalui keanggotaan dalam suatu kelompok, kehadiran digereja/tempat ibadah, kontribusi derma, partisipasi di tingkat komunitas, dan menjadi pengurus di organisasi lokal. Dimensi keamanan dan kejahatan menekankan pada jumlah kasus pembunuhan di kalangan pemuda, ketakutan akan kejahatan, dan jumlah kejahatan yang dilaporkan. Sementara dimensi stabilitas dan integritas keluarga diukur dari tingkat perceraian dan jumlah kelahiran di luar nikah.

2.2.5. Global Social Capital Survey

Model ini dikembangkan oleh Deepa Narayan, dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator untuk mengukur ketersediaan modal sosial. Ketujuh indikator tersebut adalah: (a) karakteristik kelompok (meliputi jumlah keanggotaan; kontribusi dana; frekuensi partisipasi; partisipasi dalam pembuatan keputusan; heterogenitas keanggotaan; sumber pendanaan bagi organisasi); (b) norma-norma umum (meliputi kesediaan menolong orang lain; kepedulian pada orang lain; keterbukaan pada orang lain); (c) kebersamaan (meliputi seberapa jauh orang-orang dapat hidup bersama; tingkat kebersamaan di antara orang-orang); (d) sosialitas keseharian; (e) hubungan ketetanggaan (meliputi kesediaan meminta tolong pada tetangga untuk merawat anak yang sakit; atau membantu diri sendiri yang sedang sakit); (f) voluntarisme (meliputi apakah pernah bekerja sebagai relawan; ekspektasi dari kegiatan sukarela; kritik terhadap mereka yang menolak bekerja sukarela; kontribusi pada lingkungan ketetanggaan; apakah pernah menolong orang lain); serta (g) kepercayaan (meliputi kepercayaan pada keluarga; pada tetangga; pada orang dari kelas yang berbeda; pada pemilik usaha; pada aparat pemerintah; pada penegak hukum, seperti jaksa, hakim, dan polisi; pada aparat pemerintah daerah).

2.2.6. Social Capital Assessment Tool

Model ini menggunakan sejumlah instrumen untuk mengukur modal sosial, antara lain dengan

menggunakan pemetaan komunitas, pemetaan aset, kuesioner, wawancara, dan lembar penilaian. Unit analisisnya adalah komunitas dan rumah tangga (World Bank, Social Capital Assessment Tool (SOCAT), <http://go.worldbank.org/KO0QFVW770>, diakses tanggal 1 Oktober 2012, Pukul 19.40 WIT).

2.2.7. Integrated Questionnaire for The Measurement of Social Capital (SC-IQ)

Model ini dikembangkan oleh Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock (2004) dengan penekanan fokus pada negara-negara berkembang. Model ini bertujuan memperoleh data kuantitatif pada berbagai dimensi modal sosial dengan unit analisis pada tingkat rumah tangga. Pada model ini, digunakan 6 (enam) indikator, yakni: (a) kelompok dan jejaring kerja; (b) kepercayaan dan solidaritas; (c) aksi kolektif dan kerjasama (cooperation); (d) informasi dan komunikasi; (e) kohesi dan inklusivitas sosial; serta (f) pemberdayaan dan tindakan politik (Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock dalam World Bank, Social Capital Assessment Tool (SOCAT), <http://go.worldbank.org/KO0QFVW770>, diakses tanggal 1 Oktober 2012, Pukul 19.40 WIT).

Berdasarkan model-model tersebut, dalam studi ini akan menggunakan model SC-IQ dengan pertimbangan bahwa instrumen tersebut merefleksikan dimensi struktural, kognitif, prosedural, dan outcomes dari modal sosial. Dimensi struktural berkaitan dengan keanggotaan dalam kelompok, dimensi kognitif berkaitan dengan persepsi tentang kepercayaan dan norma-norma. Dimensi prosedural tergambar dari indikator tentang aksi kolektif dan kerjasama, serta alur informasi dan komunikasi yang menunjukkan bagaimana modal sosial difungsikan. Dimensi outcomes dari modal sosial terkait dengan kohesivitas, inklusivitas sosial, pemberdayaan dan tindakan politik yang merupakan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari modal sosial.

METODE PENELITIAN

1.1. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2010:68).

Dengan menggunakan desain penelitian Deskriptif Kualitatif, maka dalam penelitian ini informasi atau data mengenai modal sosial dan pembangunan yang diperoleh dari para informan melalui wawancara, observasi dan dokumen akan peneliti buat dalam bentuk deskripsi gambaran (berupa kata-kata tertulis) yang kemudian disusun secara sistematis, faktual dan akurat.

1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Batalyon 712 Wiratama, Teling, Manado, Sulawesi Utara

1.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama atau data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara atau pengamatan, sementara data sekunder diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya atau data yang telah diolah (Prastowo, 2011:2004).

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atau hasil wawancara yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu prajurit dan pejabat terkait di TNI-AD Batalyon 712 Wiratama, Teling. Data sekunder yang merupakan penunjang atau sumber tambahan dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga resmi seperti koperasi, Pusat Kesehatan, dan lain sebagainya yang berupa laporan, opini, buku-buku, dokumen peraturan.

1.4. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif memegang peranan penting karena informan merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian. Dalam studi ini penulis menentukan informan melalui purposive sampling, yaitu melalui key persons, karena awalnya penulis sudah memahami informasi awal tentang objek maupun informan penelitian. Key persons (orang-orang kunci) tersebut antara lain adalah para pengelola atau pengurus organisasi internal di TNI-AD Teling yang terlibat secara langsung atau juga prajurit yang mengamati (Bungin, 2010:77).

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Dari berbagai metode pengumpulan data yang ada, studi ini menggunakan metode kombinasi yang bersandar pada wawancara mendalam, dokumen tertulis dan observasi. Penulis memilih menggabungkan ketiga metode tersebut untuk bisa saling melengkapi.

1.5.1. Wawancara Mendalam

1.5.2. Observasi/Pengamatan

1.5.3. Dokumentasi

1.6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu:

1.6.1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2012:92). Dalam hal ini yang direduksi yaitu seluruh jawaban atau hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi yang di peroleh dari para informan di desa paca.

Reduksi data juga merupakan langkah permulaan atau proses Pengolahan. Oleh sebab itu dalam langkah permulaan ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi dokumen-dokumen, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data, selanjutnya adalah perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip wawancara. Kemudian mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya serta memberi kode (Prastowo, 2007:238).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Secara keseluruhan dalam bagian ini, peneliti mengembangkan suatu kerangka analisis yang membantu untuk menjelaskan pemetaan modal sosial, pemanfaatannya dan juga menemukan perspektik yang konstruktif bagi pembangunan TNI-AD secara khusus pada Batalyon 712 Wiratama. Karena itu bagian awal dari BAB ini akan mengelaborasi pemetaan modal sosial yang terlihat melalui ketersediaan asosiasi/perserikatan. Asumsi yang mendasari hal tersebut adalah kehadiran asosiasi memiliki tujuan dan misi masing-masing karena itu keterlibatan seseorang dalam asosiasi tersebut didasari oleh keterikatan yang memiliki solidaritas, kepercayaan, pengertian dan nilai-nilai bersama.

Pembahasan selanjutnya akan melihat wujud dari tipologi modal sosial, berupa modal sosial terikat (bonding social capital) dan modal sosial yang menjembatani (bridging social capital). Tipologi modal sosial terikat memiliki ciri khas di dalam konteks ide, relasi dan perhatian, adalah lebih berorientasi

ke dalam (inward looking), sedangkan pada tipologi modal sosial yang menjembatani lebih berorientasi ke luar (outward looking). Melihat objek dari penelitian ini cenderung homogen (Homogenius), maka pembahasan hanya mengelaborasi secara dalam modal sosial terikat yang berorientasi ke dalam. Apa yang menjadi perhatian terfokus pada upaya pengungkapan nilai-nilai yang turun temurun yang telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata perilaku (code conduct) dan perilaku moral (code of ethics).

Tahapan berikutnya pada bagian ini akan mengulas terkait pemanfaatan modal sosial bagi pembangunan. Pertanyaan inti yang dijawab pada bagian ini adalah bagaimana modal sosial yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan TNI-AD di Batalyon 712 Wiratama. Pemanfaatan dimaksud meliputi perluasan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perluasan akses profesionalisme TNI.

Paling akhir dari bagian ini peneliti akan mencoba mengkonstruksi gagasan sebagai upaya menemukan perspektif memanfaatkan modal sosial yang terdapat dalam Batalyon 712 Wiratama. Walaupun bangunannya teoritikal namun analisis pada bagian ini sangat menarik karena berangkat dari sebuah analisis empirik terhadap kompleksitas persoalan modal sosial di Batalyon 712 Wiratama.

4.2.1 Ketersediaan Asosiasi

Jaringan terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu secara prinsip atau pemikiran. Dalam strata masyarakat apa pun biasanya muncul banyak asosiasi atau perserikatan baik atas dasar profesi maupun ikatan primordial yang lain. Kehadiran asosiasi ini selalu mempunyai tujuan dan misi yang ingin diwujudkan oleh masing-masing asosiasi. Modal sosial biasanya diukur dari keberadaan dan keterlibatan seseorang dalam asosiasi tertentu.

Harus diakui bahwa pada Batalyon 712 Wiratama pola organisasinya sangat berbeda dengan keberadaan organisasi lain. Sistem yang terbangun sangat diarahkan pada proses meminimalisir potensi konflik dalam organisasi tersebut. Karena itu keberadaan asosiasi/perserikatan pada internal organisasi Batalyon TNI-AD secara keseluruhan yang besar jarang sekali terlihat adanya asosiasi atau perserikatan didalamnya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan sebelumnya sebagai upaya meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi.

Batalyon 712 Wiratama dengan segala keberadaannya paling tidak memiliki modal sosial yang dapat dinyatakan melalui lembaga atau kelompok yang telah terbentuk yaitu PRIMKOPAD. Koperasi

ini beranggotakan seluruh prajurit maupun PNS pada Batalyon 712 Wiratama. Sebagaimana koperasi pada umumnya, Primkopad melaksanakan mekanisme yang sama yaitu memberikan pinjaman atau modal kepada anggota-anggota kelompok, juga membina anggota-anggota kelompok untuk membangun suatu kebersamaan dalam rangka meningkatkan ekonomi rumah tangga. Selain mendapatkan modal pinjaman, anggota Koperasi juga mendapatkan banyak keuntungan yaitu adanya asuransi dan tabungan, baik itu tabungan pokok atau tabungan sukarela yang harus diikuti oleh setiap anggota karena merupakan aturan.

1.2.2.1 Pancasila

Modal sosial utama atau dasar yang dapat membentuk semangat kolektifitas, loyalitas dan disiplin dalam TNI-AD secara khusus pada Batalyon 712 Wiratama adalah Pancasila. Dalam pandangan prajurit TNI-AD Pancasila merupakan landasan ideal, ideologi nasional dan dasar negara dimana keseluruhan sistem dan proses penyelenggaraan negara serta pembangunan bangsa harus didasarkan dan diarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung pada sila-silanya. Hanya dengan berlandaskan Pancasila bangsa Indonesia akan jelas arah yang hendak dicapai dan terang jalan yang hendak dilalui, sehingga tidak akan tersesat dalam menuju dan meraih cita-citanya.

Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

TNI-AD memaknai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

TNI-AD juga memaknai nilai kemanusiaan yang

adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Nilai persatuan Indonesia dimaknai sebagai usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan dimaknai sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Sedangkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atau batiniah.

Walapun dalam pandangan umum nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif, namun sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai yang membentuk kesadaran kolektif TNI-AD secara khusus juga di Batalion 712 Wiratama.

1.2.2.2 Sumpah Prajurit

Modal sosial kedua yang mengikat profesi dan kehidupan prajurit adalah sumpah prajurit. Sumpah merupakan pernyataan sikap atau tekad bathin manusia untuk berbuat dan perilaku sebaik-baiknya. Sumpah adalah janji suci di hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang diucapkan untuk melaksanakan sesuatu yang tersirat dan tersurat dari apa yang diucapkan, berani menderita menerima resiko bila janji itu tidak dilaksanakan. Dengan mengucapkan Sumpah diharapkan mampu memberi dorongan kepada manusia untuk bersikap, berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai norma-norma serta kaidah-kaidah yang berlaku baik dalam pergaulan kemasyarakatan, kedinasan maupun kenegaraan.

Sumpah prajurit dibuat dan diwajibkan untuk diucapkan oleh setiap Prajurit TNI dengan tujuan menjadikan setiap Prajurit TNI terikat pada kewajibannya. Mengucapkan Sumpah Prajurit secara formal oleh setiap Prajurit TNI dimaksudkan agar setiap Prajurit TNI berkewajiban untuk mematuhi sumpahnya yaitu meneguhkan kesetiaan dan ketaatan, menebalkan rasa tanggung jawab, meningkatkan kewaspadaan serta menumbuhkan konsolidasi dalam tubuh TNI.

Sumpah Prajurit sangat dipahami dipahami dan

meresap dalam sanubari setiap anggota Prajurit TNI, serta diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diktum sumpah prajurit adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah / berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Diktum Sumpah Prajurit tersebut disebut sebagai Sumpah Prajurit Umum (bukan untuk berita acara) dengan kata lain juga disebut Sumpah Promesoir yaitu sumpah yang mengandung janji bahwa yang bersumpah akan berusaha sekuat tenaga dan sungguh-sungguh setia dan menepati apa yang diikrarkan/dijanjikan. Sumpah prajurit ini menjiwai dan mengikat setiap prajurit dalam pelaksanaan tugas dimana dan kapanpun dia berada. Karena itu, ikrar ini merupakan modal besar bagi institusi TNI-AD Batalyon 712 Wiratama dalam meningkatkan profesionalitas prajurit.

1.2.2.3 Delapan Wajib TNI

Delapan wajib TNI merupakan sistem nilai yang juga sangat dipegang oleh seluruh prajurit di Batalyon 712 Wiratama. Dalam sistem nilai etika keprajuritan TNI sejak awal kelahirannya, Delapan Wajib TNI merupakan pernyataan komitmen dan sikap yang dijalani tiap-tiap hari. Diktum delapan wajib TNI adalah sebagai berikut:

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat

Salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang sudah dikenal seluruh dunia adalah sikap ramah tamah, saling bertegur sapa, tidak bengis, tidak eksklusif. Sikap ini akan memudahkan prajurit dalam berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungannya secara harmonis, ia sadar sebagai warga negara biasa. Sehingga keramahtamahan menjadi media yang efektif untuk menumbuhkan loyalitas dan solidaritas rakyat terhadap TNI dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat

Sopan santun dalam pergaulan merupakan salah satu prasyarat terciptanya manusia beradab dan dapat

membangun interaksi sosial. Dengan menerapkan sopan santun maka akan tumbuh saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian sopan santun adalah media yang sangat tepat bagi prajurit TNI merebut hati rakyat. Rakyat akan memberikan kesetiaan dan dukungan optimal kepada TNI dalam melaksanakan tugas sebagai bhayangkari Negara.

3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita

Menghormati wanita merupakan nilai dasar dan prinsip bagi seorang manusia. Karena wanita adalah presentasi seorang ibu (al-Umm, memiliki makna simbolik pengayom, pelindung, sumber kasih sayang, sabar, tulus dan rela berkorban). Menghormati wanita akan menumbuhkan kesadaran prajurit akan jatid dirinya (fitrah kelahirannya) sekaligus meneladani karakter ibu sebagaimana yang terkandung dalam makna simbolik “al-Umm”.

4) Menjaga kehormatan diri di muka umum

Menjaga kehormatan diri merupakan kewajiban dasar setiap manusia. Ajaran agama menyebut Kehormatan diri dengan istilah “muru’ah” yang difahami sebagai Kehormatan, Harga Diri, dan Kewibawaan, mengaplikasikan akhlak yang terpuji dalam segala aspek kehidupan serta menjauhkan akhlak yang tercela sehingga seseorang senantiasa hidup sebagai orang terhormat. Kepribadian yang terhormat dan berwibawa menjadikan seorang prajurit sebagai teladan dan panutan masyarakat lingkungannya.

5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya

Kesederhanaan populer dengan sebutan “qanaah”, bermakna, merasa cukup dan menerima atas apa yang telah diberikan Allah swt, sehingga mampu menjauhkan diri dari sikap tidak puas yang berlebihan. Alghazali menguraikan bahwa qana’ah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang, Sikap ini akan menghindarkan prajurit dari perilaku pragmatis dan hedonis.

6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat dan 7). Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat

Seorang prajurit tidak boleh merugikan, menakuti dan menyakiti hati rakyat, baik aspek materi (harta benda) maupun immateri (antara lain harga diri, rasa aman rasa nyaman dan ketentramannya) yang menyebabkan rakyat bersikap apriori dan antipati terhadap keberadaan TNI. Sehingga menghambat

berhasilan pelaksanaan tugas pokoknya.

8) Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Sikap ini adalah bentuk kepekaan dan solidaritas, tanggap terhadap lingkungan sekitarnya. Derita rakyat, kesulitan rakyat adalah derita dan kesulitannya. Ia mencintai menyayangi dan membantu rakyat layaknya menyayangi dan membantu diri dan keluarganya. Sikap ini akan membangun “kemanunggalan sejati” TNI-Rakyat.

1.2.2.4 Sapta Marga

Modal sosial lain yang terdapat dalam TNI-AD secara khusus Batalyon 712 Wiratama adalah Sapta Marga. Setiap Angkatan Bersenjata dari negara manapun di dunia, mempunyai Kode Kehormatan atau Pedoman Hidup yang menjadi tuntunan maupun tali ikatan yang memberikan arah serta yang mengatur tiap langkah dan tindak-tanduknya di dalam dan di luar Angkatan. Kode Kehormatan atau Pedoman Hidup menentukan corak, watak dan hakekat dari Angkatan tersebut, sehingga tercermin tingkah lahir dan bathin dari Angkatan tersebut.

Kode Kehormatan atau Pedoman Hidup dalam pelaksanaannya harus disertai dengan disiplin yang kuat, ditaati, dituruti, bahkan diberi sanksi-sanksi, apabila dilanggar atau diabaikan. Hanya dengan disiplin yang kuat akan dapat dipetik manfaat dari nilai-nilai budi yang luhur, sikap dan watak yang baik, moral yang tinggi serta mental yang baik, oleh karena sudah menjadi suatu kebiasaan, maka lambat laun nilai-nilai tersebut mendarah daging, menjadi landasan bagi setiap prajurit di dalam berpikir, berbuat, bertindak, bekerja dan berjuang dimana dan pada saat apapun. Dalam hubungan ini pulalah, Tentara Nasional Indonesia memiliki Kode Kehormatan atau Pedoman yang lebih dikenal dengan Sapta Marga, yaitu Tujuh Jalan yang harus ditempuh oleh setiap insan Prajurit TNI.

Dictum sapta marga adalah sebagai berikut:

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada

pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Pedoman Hidup ini pulalah yang mempersatukan dan menyeragamkan tingkah lahiriah, bathiniah, tekad, tujuan serta semangat juang yang dijiwai oleh Amanat Penderitaan Rakyat dalam rangka mengantar rakyat Indonesia mencapai Tujuan Perjuangan Nasional. Sapta Marga bertujuan untuk membentuk sifat-sifat Prajurit TNI yang mempunyai ketahanan ideologi Pancasila, ketahanan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat dan ketahanan keyakinan beragama. Oleh karena itu yang diutamakan adalah faktor-faktor moral, mental serta ketangguhan jasmaniah yang pantang menyerah, berjuang tanpa akhir, bijaksana, rasa tanggung jawab dan kepemimpinan yang tinggi, menjadi pemimpin yang mampu mempersatukan seluruh prajurit, pemimpin yang berintegrasi dengan rakyat, justru kepentingan rakyat pulalah hakekat dari pengabdian TNI. Sapta Marga dalam kehidupan TNI-AD merupakan sebuah kahas-rusan untuk diamalkan. Untuk mewujudkan prajurit yang memiliki identitas maka sapta marga menjadi cirri dasar dalam kehidupan prajurit.

1.2.3 Pemanfaatan Modal Sosial

Modal sosial sebagai sumber daya sosial yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, dapat memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam suatu masyarakat. Sebagai bentuk dari jaringan kepercayaan dalam Batalyon 712 Wiratama, hasil pemetaan menunjukkan hanya ada satu jaringan kerja sama asosiasi yaitu Primer Koperasi yang ada, selain modal sosial dengan tipologi bonding social capital.

1.2.3.1 Perluasan Akses ekonomi

Primer Koperasi yang ada pada Batalyon 712 Wiratama cukup memberikan kontribusi perluasan akses ekonomi bagi prajurit. Hal ini sangat nyata dari diberikannya akses terhadap pinjaman oleh anggota secara keseluruhan, untuk membantu peningkatan ekonomi rumah tangga. Selain itu juga, Primer Koperasi dalam manajemen pengelolaannya memberikan asuransi dan tabungan kepada anggota. Hal ini dapat mendorong budaya menabung bagi seluruh anggota, sehingga peningkatan ekonomi melalui koperasi berdampak positif bagi semua prajurit. Namun sayangnya

Primer koperasi tidak memberanikan diri dan belum mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dan masih terfokus pada kegiatan kelompok internal Batalyon 712 Wiratama sehingga belum bisa menunjang perluasan akses ekonomi secara menyeluruh.

4.2.3.2 Perluasan Akses Pendidikan

Primer Koperasi dalam hal perluasan akses pendidikan juga memberikan peluang melalui program tabungan pendidikan dan beasiswa bagi anak prajurit yang secara kepegangannya rendah. Hal ini dilakukan untuk membantu memuluskan peluang dan cita-cita bagi semua anak prajurit untuk dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian kontribusi asosiasi ini sangat baik bagi perluasan akses pendidikan anak prajurit. Pada sisi lain, asosiasi ini terbatas dalam memberikan sumbangsi keringanan biaya pendidikan bagi prajurit yang menempu pendidikan formal maupun dalam pendidikan untuk kenaikan kepegangatan.

4.2.3.3 Perluasan Akses Kesehatan

Dalam hal perluasan akses kesehatan, Primer Koperasi juga melaksanakan program untuk dana sehat bagi semua prajurit. Hal ini sangat membantu prajurit yang mengalami gangguan kesehatan dan keterbatasan dana dalam memenuhi biaya kesehatan. Selain dana sehat, Primer Koperasi juga melaksanakan program bantuan dana duka bagi prajurit yang mengalami keduakaan.

4.2.3.4 Peningkatan Akses profesionalisme

Kamus Webster, menjelaskan kata profession berasal bahasa Yunani “*profess*”, berarti “*ikrar*”. Kata *Profes* berarti “*pengikrar laki-laki*”, *professe* “*pengikrar perempuan*”. Dari kata *profess* timbul kata bentukan, *profession* yang memiliki beberapa arti, antara lain:

1. An occupation, not purely commercial, to which one devotes oneself. (Suatu pekerjaan yang tidak murni komersial, di mana seseorang mencurahkan seluruh dirinya).
2. A calling in which one profess to have acquired some special knowledge used by way either of instructing, guiding, or advising others of serving them in some art; as profession of arms, profession of teaching, profession of chemist. (Suatu panggilan dalam mana seseorang berikrar untuk menguasai pengetahuan pengetahuan khusus melalui pelatihan, pembimbingan, atau kepenasehatan yang ia abdikan bagi orang lain dalam beberapa bidang kiat; misalnya profesi

militer, profesi guru, profesi ahli kimia dan lain sebagainya).

4.2.4 Membangun Perspektif Modal Sosial

Dalam kehidupan suatu masyarakat atau komunitas, seorang individu akan berhubungan dengan individu lain yang juga anggota masyarakat atau komunitas yang bersangkutan, dan hubungan tersebut tidak hanya dalam satu arena tertentu saja akan tetapi sangat berkaitan dengan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan manusia dalam rangka kehidupannya terwujud dalam bentuk-bentuk bahasa, dan struktur kemasyarakatan, kekerabatan, teknologi maupun agama.

Modal sosial adalah konsep yang muncul dari hasil interaksi di dalam masyarakat dengan proses yang lama. Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri. Interaksi semacam ini melahirkan modal sosial yang berupa ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang.

Dalam upaya membangun perspektif modal sosial dan pemanfaatannya secara maksimal pada Batalyon 712 Wiratama maka sebelumnya peneliti mencoba menelaah secara dalam beberapa perspektif modal sosial. Pemahaman tentang perspektif ini akan sangat membantu dalam memetakan perkembangan pemahaman modal sosial yang sudah berlangsung selama ini. Selain itu dengan pemahaman perspektif ini akan membantu pengambil kebijakan dalam membuat keputusan yang tepat. Woolcock dan Narayan (dalam Aliwear 2000:2), memperkenalkan 4 perspektif yang perlu kita ketahui ketika mempelajari modal sosial dan pembangunan. Empat perspektif tersebut adalah komunitarian (*communitarian view*), jaringan (*network view*), kelembagaan (*institutional view*), dan sinergi (*sinergy view*). Keempat perspektif tersebut akan dibahas lebih detail di bawah ini.

4.2.4.1 Pandangan Komunitarian

Perspektif atau pandangan komunitarian cenderung melihat modal sosial sama dengan organisasi sosial biasa seperti perkumpulan, asosiasi, dan kelompok masyarakat sipil. Pandangan komunitarian memberi tekanan pada partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan kelompok sebagai ukuran modal sosial. Semakin besar jumlah anggota suatu perkum-

pulan atau asosiasi semakin baik modal sosial dalam komunitas tersebut. Modal sosial yang besar akan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan komunitas. Pandangan ini melihat bahwa modal sosial mempunyai kontribusi yang cukup penting melepaskan anggota komunitas dari kemiskinan.

Namun perlu diperhatikan sisi negatif modal sosial. Modal sosial tidak selamanya menguntungkan tapi dapat merugikan orang yang bukan kelompok. Misalnya, modal sosial yang terbentuk di kalangan kriminal atau kelompok preman dapat dianggap sebagai modal sosial yang merugikan (*perverse social capital*) yang menghambat pembangunan. Kehadiran kelompok kriminal yang berlebihan dapat membuat para investor atau pengusaha merasa tidak aman sehingga mereka mencari tempat yang lebih baik bagi investasi. Kejahatan yang terorganisir selain menyebabkan korban jiwa, dapat pula menciptakan situasi yang tidak menentu bagi pengusaha. Dengan kata lain modal sosial negatif menciptakan biaya yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh sehingga para investor menghindari lokasi tersebut.

Pengalaman beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa walaupun wilayah tertentu mempunyai tingkat solidaritas sosial yang tinggi dan mempunyai kelompok informal yang kuat namun tidak mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ada beberapa komunitas gagal berkembang secara ekonomi karena tidak mempunyai hubungan dengan sumber sumber lain di luar komunitasnya. Hal ini sering terjadi dengan negara negara di Afrika dan Asia yang masih terisolir.

Muncul juga kasus penduduk asli terisolir dari dunia luar dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi namun mereka tetap terbelakang secara ekonomi karena tidak mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup dan tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan yang memungkinkan mereka mempengaruhi keputusan politik demi perbaikan nasib mereka. Hal ini dapat kita temui di beberapa wilayah Indonesia Timur, terutama Papua yang masih terisolir karena infrastruktur transportasi yang masih minim. Dalam era otonomi sering putra daerah minta diistimewakan. Jika ini berlangsung terus menerus mereka akan mengalami isolasi sosial yang menghambat perkembangan mereka sendiri.

4.2.4.2 Pandangan Jaringan

Pandangan modal sosial yang kedua lebih menekankan pada asosiasi atau hubungan vertikal dan horisontal antar masyarakat dan antar kelompok kelompok dalam komunitas dan perusahaan. Pandangan ini melihat bahwa ikatan dalam kelompok yang

kuat memungkinkan anggota komunitas mempunyai kesadaran tentang identitas kelompok dan tumbuh rasa kebersamaan untuk mengejar tujuan bersama. Namun pada saat yang sama identitas kelompok yang kuat dapat menumbuhkan sikap sektarian antar kelompok berdasarkan suku, agama, kelas, gender, dan status sosial ekonomi. Hubungan sosial yang menekankan pada rasa kebersamaan dalam kelompok disebut sebagai bonding social capital dan hubungan sosial yang melewati batas kelompok disebut sebagai bridging social capital.

Agar kita mendapatkan gambaran keterkaitan antara bonding social capital dengan bridging social capital, gambar 1 di atas akan lebih memperjelas. Gambar 1 menunjukkan bahwa jaringan sosial kelompok yang masuk dalam kategori miskin semakin beragam sejalan dengan kenaikan tingkat kesejahteraan mereka. Modal sosial tercakup dalam jaringan yang mereka bangun dan dimanfaatkan secara baik dan efisien seperti program Grameen Bank yang diperkenalkan Muhammad Yunus di Bangladesh. Para perempuan miskin di sana tidak mempunyai jaminan namun mereka mendapat pinjaman berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Pinjaman tersebut mereka pakai mendirikan dan menjalankan usaha dalam rangka memperbaiki kesejahteraan ekonomi keluarga, poin (A). Namun perkembangan usaha mereka tentu akan mencapai batas tumbuh pada poin (B) terutama jika mereka semua hanya mengadakan sumber yang sama dari bonding social capital. Kelompok ini terus berkembang sebagai akibat terus bertambahnya orang baru yang datang dari daerah asal yang sama sehingga menekan sumber daya yang ada dan dengan sendirinya mengancam kesejahteraan kelompok yang sudah mapan ke poin (C). Kelompok yang sudah datang lebih awal mulai merasa bahwa kewajiban dan komitmen moral terhadap orang dari daerah asal menghambat perkembangan mereka ke depan. Dalam situasi seperti itu sebagian komunitas ini mulai mengambil jarak dengan anggota komunitas daerah asal pada poin (D) dan mulai melihat potensi membangun jaringan yang lebih luas dengan kelompok lain. Di sini yang mereka kembangkan adalah bridging social capital dengan maksud memperluas kesempatan membuka hubungan usaha dengan kelompok lain pada poin (E). Model yang digambarkan di atas dapat dipakai menjelaskan proses migrasi yang berlangsung di banyak negara berkembang.

4.2.4.3 Pandangan Institusional

Pandangan institusi melihat kekuatan jaringan suatu komunitas terletak pada lingkungan politik,

hukum dan kelembagaan. Pandangan komunitarian dan pandangan jaringan memperlakukan modal sosial sebagai variabel independen yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat. Kebalikan dari dua pandangan terdahulu, pandangan institusional memperlakukan modal sosial sebagai variabel dependen. Para penganut pandangan ini percaya bahwa kapasitas bertindak suatu kelompok sosial untuk mencapai tujuan tertentu tergantung pada kualitas institusi formal di wilayah masing-masing. Mereka juga percaya bahwa kinerja suatu negara atau perusahaan sangat tergantung pada faktor internal seperti, koherensi, kredibilitas, dan kompetensi dan keterbukaan mereka terhadap masyarakat sipil. Pandangan ini memungkinkan pemerintah berperan dalam mendorong terbentuknya jaringan. Kebijakan kelembagaan dapat memperkuat atau melemahkan jaringan dalam masyarakat.

Pengalaman beberapa wilayah menunjukkan hubungan yang erat antara peran pemerintah mendorong modal sosial yang kuat dalam masyarakat. Desentralisasi di Brazil, misalnya, menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih (good government) ikut memperlancar semua program sosial ekonomi masyarakat lokal sehingga berjalan dengan baik. Selain itu penelitian lain mendapati adanya keterkaitan antara modal sosial dengan kelembagaan politik, legal, dan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Knack mengungkapkan bahwa kepercayaan sesama anggota komunitas, aturan hukum yang jelas, kebebasan masyarakat sipil yang luas, dan kualitas birokrasi yang baik berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal sosial dalam masyarakat ikut berperan mengurangi kemiskinan dan memperbaiki tingkat pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

Sebaliknya modal sosial yang rendah dapat mendorong masyarakat mundur secara ekonomi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi rendah terjadi pada masyarakat yang mengalami fragmentasi etnis yang tinggi dan hak politik yang rendah (Woolcock 2000). Dalam kondisi seperti ini inisiatif anggota masyarakat menurun karena ketakutan terhadap sikap anarki kelompok lain. Fragmentasi sosial seperti ini akan berkurang jika bridging social capital cukup tinggi. Lebih lanjut pandangan kelembagaan melihat kelemahan di negara berkembang seperti korupsi, birokrasi yang lambat, pembatasan kebebasan, kesenjangan ekonomi, dan kegagalan penjaminan hak milik menghambat perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kebebasan dan hak politik harus mendapat

jaminan dari pemerintah. Pemerintah harus menjamin agar mereka yang terlibat dalam proses pembangunan tidak diteror oleh mereka yang lebih kuat atau oleh negara itu sendiri.

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai modal sosial dan pembangunan pada TNI-AD Batalyon 712 Wiratama, diantaranya:

Modal sosial yang terdapat dalam TNI-AD Batalyon 712 Wiratama terlihat dari ketersediaan satu jejaring atau asosiasi PRIMKOPAD sebagai koperasi bersama yang melibatkan prajurit maupun PNS di lingkup Batalion. Walaupun hanya memiliki satu jejaring atau asosiasi namun hal ini ditopang kuat oleh modal sosial terikat. Disebut sebagai modal sosial terikat karena cenderung bersifat eksklusif. Apa yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian, adalah lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dibandingkan dengan berorientasi keluar (*outward looking*).

Studi ini menunjukkan bahwa modal sosial terikat yang terdapat dalam TNI-AD secara khusus pada Batalyon 712 Wiratama adalah Pertama; Pancasila yang merupakan landasan ideal, ideologi nasional dan dasar negara dimana keseluruhan sistem dan proses penyelenggaraan negara serta pembangunan bangsa harus didasarkan dan diarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung pada sila-silanya, menjadi modal sosial utama atau dasar yang membentuk semangat kolektifitas, loyalitas dan disiplin.

Modal Sosial terikat Kedua; adalah Sumpah Prajurit. Sumpah tersebut sebagai Modal karena mengandung janji bahwa yang bersumpah akan berusaha sekuat tenaga dan sungguh-sungguh setia dan empati apa yang diikrarkan/dijanjikan. Sumpah prajurit ini menjiwai dan mengikat setiap prajurit dalam pelaksanaan tugas dimana dan kapanpun dia berada. Karena itu, ikrar ini merupakan modal besar bagi institusi TNI-AD Batalyon 712 Wiratama dalam meningkatkan profesionalitas prajurit.

Modal Sosial terikat Ketiga; adalah Delapan wajib TNI yang merupakan sistem nilai yang juga sangat dipegang oleh seluruh prajurit di Batalyon 712 Wiratama. Dalam sistem nilai etika keprajuritan TNI sejak awal kelahirannya, Delapan Wajib TNI merupakan pernyataan komitmen dan sikap yang dijalani tiap-tiap hari. Sikap ini adalah bentuk kepekaan dan solidaritas, tanggap terhadap lingkungan sekitarnya. Derita rakyat, kesulitan rakyat adalah derita dan ke-

sulitannya. Ia mencintai menyayangi dan membantu rakyat layaknya menyayangi dan membantu diri dan keluarganya. Sikap ini akan membangun “kemunggalan sejati” TNI-Rakyat.

Modal Sosial terikat Keempat; adalah Sapta Marga. Sapta Marga merupakan kode kehormatan atau pedoman hidup dalam pelaksanaannya harus disertai dengan disiplin yang kuat, ditaati, dituruti, bahkan diberi sanksi-sanksi, apabila dilanggar atau diabaikan. Hanya dengan disiplin yang kuat akan dapat dipetik manfaat dari nilai-nilai budi yang luhur, sikap dan watak yang baik, moral yang tinggi serta mental yang baik, oleh karena sudah menjadi suatu kebiasaan, maka lambat laun nilai-nilai tersebut mendarah daging, menjadi landasan bagi setiap prajurit di dalam berpikir, berbuat, bertindak, bekerja dan berjuang dimana dan pada saat apapun. Dalam hubungan ini pulalah, Tentara Nasional Indonesia secara khusus pada Batalyon 712 Wiratama memiliki Kode Kehormatan atau Pedoman sebagai modal sosial yang lebih dikenal dengan Sapta Marga, yaitu Tujuh Jalan yang harus ditempuh oleh setiap insan Prajurit TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliwear. 2000. *Perspektif Modal Sosial dan Upaya Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: ALRus
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Edkins, Jenny dan Williams V. Nick. *Teori-teori Kritis; Menentang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: BACA
- Huntington, Samuel, P. 2001. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (terjemahan oleh Asril Marjohan), (Judul asli; *democratization in the late twentieth century*, 1989) Jakarta: Grafiti.
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa berbasis modal social dalam perspektif socio-legal*. Semarang: ilmu Pemerintahan, FISIP-Universitas Diponegoro.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratikno, dkk. 2001. *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integra-*

si Sosial”. Laporan Akhir Penelitian. FISIPOL UGM bekerja sama dengan Kantor Eks Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan.

Siagian, Sondang. 2007. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabet.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VII. Bandung: Alfabeta.

Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa: Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Tim Kontras. 2005. *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Tim Kontak

Bekerja sama dengan BPPD Propinsi Jawa Barat, Bandung.

Bahan Ajar dan pedoman bagi Gadik dan Prajurit Siswa dalam proses belajar mengajar pelajaran Sumpah Prajurit pada Pendidikan Pertama Bintara TNI AD Tahap I.

Bahan Ajar dan pedoman bagi Gadik dan Prajurit Siswa dalam proses belajar mengajar pelajaran Sapta Marga pada Pendidikan Pertama Bintara TNI AD Tahap I.

Website internet dan Dokumen Lain:

Darmayanti, Tri. “Modal sosial dan modal manusia pada pendidikan jarak jauh Di universitas terbuka”. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Vol 2, No 1, Maret 2010, <http://webcache.googleusercontent.com> [4 Maret 2012, 09:33 WIT]

Fahriza Ismail, Dimas. 2011. *Masalah Pembangunan Di Indonesia*.
<http://dimasfahriza28.blogspot.com/2011/02/masalah-pembangunan-di-indonesia.html> [13 April 2012, 19:05 WIT].

Dance J. Flassy, Sasli Rais, Agus Supriono. 2009. *Modal Sosial: Definisi Dimensi dan Tipologi*. <http://p2dtk.bappenas.go.id> [5 Februari 2011, 13.32 WIT]

Jurnal YUDHAGAMA, Vol.32 No. 1, Maret 2012

Mariadi, Dede. 2006. *Modal Sosial (Social Capital) Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. *Media Komunikasi Triwulanan-Warta Bapeda Jabar*. <http://www.bapeda-jabar.go.id> [9 Maret 2012, 19:30 WIT]

Mintorahardjo, Sukowaluyo. 2012. *DEMOKRASI: Runtuhnya modal social*. <http://www.unisos-dem.org> [09 Maret 2012, 18:26 WIT]

Witrianto. 2009. *Modal Sosial Dan Pembangunan Manusia Melayu: Kasus Indonesia Dan Malaysia*. <http://pasyafamily.blogspot.com> [2 April 2012, 12.30 WIT]

Simarmata, Rajoki. 2009. “Peran Modal Sosial dalam mendorong sector pendidikan dan pengembangan wilayah dikabupaten Samosir”. Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.

Lemlit Universitas Padjajaran Bandung. 2008. *Laporan Penelitian. Modal Sosial dan Kemiskinan*.